

SUDAH 789 ANAK DI SUMUT KERACUNAN MBG, OMBUDSMAN MINTA BGN EVALUASI

Kamis, 15 Oktober 2026 - sumut

Medan, IDN Times - Kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalami peningkatan di Sumatra Utara. Ombudsman RI melakukan pemantauan sepanjang 2026.

Ombudsman mencatat, ada tujuh kejadian di Sumatra Utara sepanjang 2026. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara, Herdensi Adnin, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi pola pengawasan program MBG.

Ombudsman juga mengungkap, dapur penyedia atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi sumber makanan bermasalah telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

1. Lonjakan kasus dan temuan bakteri pada sampel makanan

Berdasarkan data resmi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara, jumlah siswa yang menjadi korban keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melonjak drastis secara tahunan.

Sepanjang tahun 2025, tercatat ada 107 siswa yang menjadi korban dari satu peristiwa keracunan. Namun, angka tersebut meroket lebih dari tujuh kali lipat pada 2026, dengan total 789 korban jiwa yang tersebar dalam delapan insiden keracunan berbeda.

Dari catatan tren bulanan, lonjakan korban tertinggi pada tahun 2026 terjadi pada bulan Agustus yang menelan hingga 406 korban. Puncak keracunan tertinggi kedua terjadi pada bulan Februari dengan 295 korban. Sementara itu, untuk periode April, September, dan Oktober 2026, jumlah korban relatif lebih sedikit, masing-masing menyentuh angka 24, 47, dan 17 korban.

Herdensi memaparkan, delapan insiden keracunan MBG pada 2026 tersebar di Kabupaten Karo, Pakpak Bharat, Mandailing Natal, Asahan, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Dairi, dan Kota Medan. Angka tersebut melonjak tajam bila dibandingkan dengan catatan tahun sebelumnya yang hanya menyentuh dua kejadian.

Berdasarkan data laboratorium dari berbagai kasus tersebut, mayoritas sampel makanan terbukti mengandung kontaminasi bakteri berbahaya. Di Dairi dan Toba, petugas menemukan bakteri *Bacillus Cereus* dan *Staphylococcus Aureus* pada lauk pauk. Kasus di Pakpak Bharat dan Mandailing Natal turut mencatatkan temuan bakteri *E. Coli* pada sampel buah melon dan semangka. Sementara di Kota Medan, keracunan diduga bermula usai siswa meminum susu kemasan yang kini telah ditarik oleh pihak sekolah untuk diuji lab.

2. Sertifikat sanitasi tak selaras dengan kepatuhan pekerja SPPG

Status bersertifikat yang dipegang oleh pihak SPPG membuat Ombudsman memberikan sorotan tajam pada tingkat kepatuhan para pekerja dapur. Pekerja di instansi ber-SLHS seharusnya sudah diwajibkan memahami standar kelayakan bahan, proses pencucian, hingga pengaturan durasi penyimpanan (holding time).

"Apalagi, setelah kami melakukan pemeriksaan, hampir semua SPPG yang terkait dengan kejadian ini sudah mengantongi SLHS. Artinya, para pekerjaannya seharusnya sudah mendapatkan pelatihan dan memahami apakah bahan makanan layak diolah atau tidak, serta apakah makanan yang dihasilkan layak dikonsumsi," ujar Herdensi di kantornya, Selasa (13/10/2026).

Ia mencontohkan indikasi kelalaian operasional seperti dugaan penyimpanan sarden di luar freezer di Kabupaten Karo dan penyajian nasi beserta rendang yang diduga basi di Kabupaten Asahan.

3. Desakan evaluasi pengawasan secara sistematis

Program MBG dinilai berisiko mencederai kesehatan siswa jika pelaksanaannya luput dari tata kelola yang terstandarisasi. Mengingat petugas dinas kesehatan tidak mungkin memonitor seluruh aktivitas di dapur secara harian, Herdensi menuntut lembaga pengawas terkait untuk bekerja lebih efektif di lapangan.

"Kami menuntut BGN pusat segera turun tangan mengaudit kinerja dan mekanisme pemantauan KPPG Sumut-Aceh. Ini yang saya kira penting untuk dilihat oleh BGN pusat. Jadi, KPPG Sumut-Aceh juga harus dievaluasi. Bagaimana sebenarnya pengawasan yang sudah mereka lakukan terhadap SPPG-SPPG yang berada di Sumatra Utara?" pungkas Herdensi.